

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (legal teori) dan Teori Keadilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*, Vol-1. Kencana, Cet-1. Jakarta.
- A.P Parlindungan. 1999. *Pendaftaran Tanah Indonesia*. Mandar Maju. Bandung.
- Boedi Harsono. 1997. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Djambatan. Bandung.
- E. van Donzel. B. Lewis. dkk (ed). 1990. *Encyclopedia of Islam*. E.J. Brill.. Jil. IV. Leiden.
- Gary L. Kreps. 1986. *Organizational Communication : Theory and Practice*. Longman. New York.
- Hadi Arnowo, Waskito. 2017. *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*. PT Balebat Dedikasi Prima. Jakarta.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu. Surabaya.
- Harsono, Budi. 2005. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*. Djambatan. Jakarta.
- HS, Salim. 2010. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta.
- HS, Salim dan Nurbani, Erlies Septiana. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ibnu Hajar. 2008. *Nataij Afkar fi takhriiji ahaaditsil adzkar*, Daar Ibnu Katsir. Vol.7.
- Limbong, Bernhard. 2012. *Konflik Pertanahan*. Margaretha Pustaka. Jakarta.
- Lewis Coser. 1956. *The Function Of Social Conflict*. Free Press. New Of Social Conflict. Free Press. New York.
- Lubis, Abd. Rahim dan Lubis, Yamin. 2010. *Hukum Pendaftaran Tanah "Edisi Revisi"*. Mandar Maju. Bandung.

- Maria S.W Sumardjono.2008. *Mediasi Sengketa Tanah*. Penerbit Buku Kompas. Jakarta.
- Moore, Christopher W. 1995. *Mediasi Lingkungan, ICEL dan CDR Associateshal*. Jakarta.
- Murad, Rusmadi. 1991. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Almuni. Bandung.
- Muttaqin, Andi. 2008. *Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Kragilan Kecamatan Kadipiro Oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta*.Sebelas Maret University Press. Surakarta.
- Nurlinda Ida. 2009. *Prinsip-prinsip Pembaharuan Hukum Agraria: Perspektif Hukum*. Rajawali Pers Jakarta.
- Perangin, Effendi. 1994. *Hukum Agraria di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada.Jakarta.
- Prakoso, Djoko dan Purwanto, Budiman Adi. 1999. *Eksistensi Prona Sebagai Pelaksana Mekanisme Fungsi Agraria*. Ghalia. Jakarta.
- Priyatna Abdurrasyid. 2002. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Suatu Pengantar*. Penerbit PT Fikahati Aneska – BANI. Jakarta
- Robbins, S. P.2003. *Perilaku Organisasi*. Alih Bahasa: Tim Indeks. PT Indeks Kelompok Gramedia.Jakarta.
- Santoso, Urip. 2008. *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*. Prenada Media Group. Jakarta.
- Sarjita. 2005. *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*. Tugu jogja Pustaka. Yogyakarta.
- Soedikno Mertokusumo. 1988. *Hukum dan Politik Agraria*. Karunika-Universitas Terbuka. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum*. UI Press. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2007. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajagrafindo. Jakarta.

Sumarto. 2012. *Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win Win Solution*. Badan Pertanahan Nasional RI Direktorat Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional RI. Jakarta.

Wahid, Muchtar. 2008. *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*. Republika. Jakarta.

Widjaja, Gunawan. 2004. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Yamin lubis dan Abd. Rahim Lubis. 2008. *Hukum Pendaftaran Tanah*. Mandar Maju. Bandung. Hlm. 28

B. Jurnal

Hastungkara, Atindriya. 2017. *Perlindungan Hukum Atas Perbedaan Luas Faktual Dengan Surat Ukur Pada Sertipikat Hak Atas Tanah*. Jurnal hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Airlangga. Vol. 11. No. 2.

Nia Kurniati, Efa Laela Fakhriah. 2017. BPN Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia Pasca Perkaban No. 11 Tahun 2016. Jurnal hukum, Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran. Vol. 19. No. 2.

Risnawati, Ayu Sari dan Nurwati. 2015. *Urgensi Pengukuran Ulang Batas Kepemilikan Tanah Di Bpn Kab Magelang*. Jurnal hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhamadiyah Magelang. Vol. 11. No. 1.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 34 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis penanganan dan penyelesaian masalah pertanahan.

D. Internet

Konflik Agraria Sepanjang Tahun 2017, <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/27/14592061/659-konflik-agraria-tercatat-sepanjang-2017-mencakup-lebih-dari-500000> diakses pada tanggal 09 mei 2018 pukul 09.00 WIB.

Konflik Agraria <http://digilib.unnes.ac.id> diakses pada tanggal 16 juli 2018 pukul 01.00 WIB

Penolakan Warga Domato Atas Pengembalian Batas Tanah. <https://halbar.malut.polri.go.id/penolakan-warga-domato-atas-pengembalian-batas-tanah/> diakses pada tanggal 09 mei 2018 pukul 09.00 WIB.

Penyerobotan Tanah, Bobby Tuding BPN Kota Mobagu Perlambat Surat Ukur Pengembalian Batas. <http://www.lingkar8.co.id/2018/01/13/terkait-penyerobotan-tanah-boby-tuding-bpn-kotamobagu-perlambat-penerbitkan-surat-ukur/> diakses pada tanggal 09 mei 2018 pukul 07.00 WIB.

Widhi Handoko, Contoh Penulisan Proses Penelitian Dalam Metode Penelitian. <http://widhihandoko.com/?tag=metode-penelitian-kualitatif>, diakses pada tanggal 15 Mei 2018 pukul 16.00 WIB.